



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung
35215

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM NOMOR: G/ /B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG KERJASAMA DAERAH

KEPALA BIRO HUKUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah, perlu diselenggarakan sosialisasi/jaring aspirasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kerjasama Daerah dengan Keputusan Kepala Biro Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG KERJASAMA DAERAH TAHUN 2012.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/JARING
 ASPIRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TENTANG KERJASAMA DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	225.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum.	Wakil Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha.	Anggota	125.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.	Anggota	125.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.	Anggota	125.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum.	Anggota	125.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum.	Anggota	125.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum.	Anggota	125.000,-	
11.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota	Anggota	125.000,-	
12.	Kepala Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Anggota	125.000,-	
13.	H. Sukiran, SH.,MH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
14.	Martalena, SE (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15.	Andini Maharani Putri, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	125.000,-	
16.	Yanuar Hastiko Putro, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	125.000,-	